

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

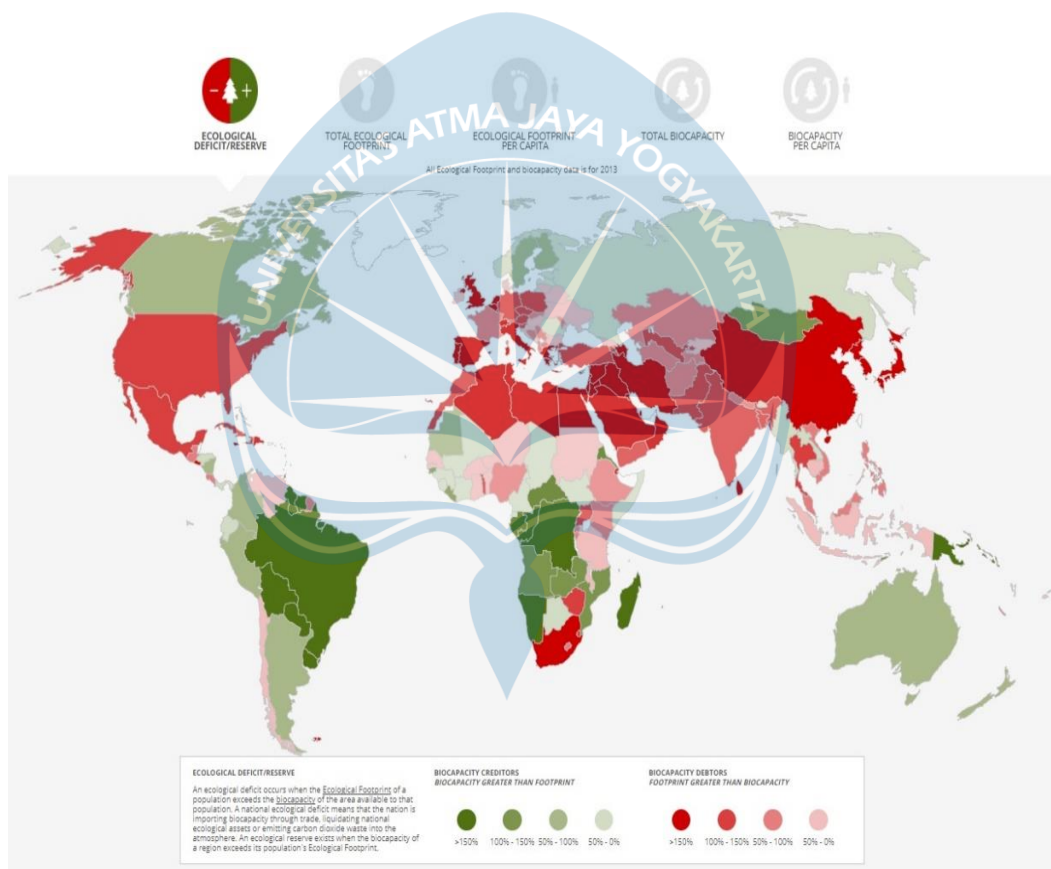
Degradasi lingkungan merupakan ancaman keberlanjutan yang sudah dirasakan dan perlu dipertimbangkan secara global. Degradasi lingkungan, disebabkan oleh aktivitas manusia yang memanfaatkan sumber daya alam secara terus menerus sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan ini akan mempengaruhi kesehatan manusia secara signifikan.

Dalam artikel *Environmental Degradation: Causes and Consequences*, degradasi lingkungan merupakan ancaman signifikan bagi kesehatan manusia di seluruh dunia. Konsekuensi berbahaya dari degradasi terhadap kesehatan manusia sudah dirasakan dan dapat tumbuh secara signifikan lebih buruk selama 50 tahun ke depan (Tyagi et al, 2014). Oleh karena itu, ancaman dari *Environmental Degradation* harus segera ditangani agar konsekuensinya tidak tumbuh secara signifikan dan semakin buruk.

Degradasi lingkungan juga dapat mengakibatkan defisit ekologis. Defisit ekologis terjadi pada saat jejak ekologis melebihi biokapasitas yang disediakan oleh lingkungan tersebut. Menurut Global Footprint Network, jejak ekologis adalah satu-satunya metrik yang mengukur seberapa banyak alam yang kita miliki dan seberapa banyak alam yang kita gunakan (Global Footprint Network, 2019). Sehingga jejak ekologis merupakan indikator yang penting untuk mengetahui seberapa banyak manusia menggunakan sumber daya alam ataupun kapasitas

biologis yang dimiliki oleh alam (biokapasitas). Ketika biokapasitas ini melebihi jejak ekologis maka akan terjadi defisit ekologis.

Defisit Ekologis sudah terjadi di dunia. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Global Footprint Network*, pada gambar 1.1 dapat dilihat persebaran wilayah di dunia yang jejak ekologisnya melebihi biokapasitas (*devicit*) dan yang belum melebihi biokapasitas (*reserve*).



Gambar 1.1 Ecological devicit/reserve (Sumber: *Global Footprint Network, 2019*)

Defisit ekologis sudah terjadi disebagian negara di dunia salah satunya negara Indonesia. Berdasarkan gambar 1.1 negara Indonesia merupakan negara yang jejak ekologisnya melebihi biokapasitas atau defisit ekologis. Berdasarkan data yang diambil dari *Global Network footprint*, pada tabel 1.1 persentase devisit ekologis Indonesia berada pada angka 32%.

Tabel 1.1 Persentasi Negara dengan defisit ekologis (*Sumber: Global Footprint Network, 2019*)

Negara	Persentasi
Singapura	9,95%
Ukraina	2%
Indonesia	32%
Malaysia	73%
Amerika	122%
Jerman	199%
Cina	278%
Korea	797%

Devisit ekologis di Indonesia jika terus dibiarkan dikawatirkan pada suatu saat negara Indonesia tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dimasa mendatang. Salah satu cara untuk menangani hal tersebut adalah dengan mulai mempertimbangkan aspek-aspek berkelanjutan terutama diperkotaan tempat mayoritas manusia tinggal.

Menurut Kuswantojo, kota merupakan ruang tempat terkonsentrasinya kehidupan manusia. Saat ini setengah penduduk dunia tinggal di kota dan akan terus meningkat sampai mungkin sekitar 70-80 persennya (Kuswantojo.T, 2006). Oleh karena itu, *Sustainability* perlu dipertimbangkan pada setiap pembangunan kota di Indonesia. Hal ini juga dikarenakan pertumbuhan kota di Indonesia sangatlah pesat. Kota kecil di Indonesia akan tumbuh menjadi kota sedang, kota sedang akan tumbuh menjadi kota yang besar, kota yang besar akan tumbuh dan berkembang menjadi kota raya atau metropolis. Jika pembangunan infrastruktur kota tidak didasarkan pada *sustainability*, Kota di Indonesia akan tumbuh semakin besar dan pada suatu waktu tertentu tidak akan mampu lagi menanggung beban kebutuhan masyarakat didalamnya.

Pembangunan infrastruktur kota di Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat di masa depan. Seiring dengan pertumbuhan kota tersebut, perlu adanya perencana rekayasa sipil, transportasi, lansekap, arsitektur, dan perencana kota yang mengerti dan mampu merancang suatu kota yang berkelanjutan. Perencana harus mengembangkan suatu wilayah perkotaan dengan mempertimbangkan aspek Lingkungan, sosial, ekonomi, dan sumber daya yang ada. Disamping itu pemerintah juga harus memberlakukan kebijakan dan peraturan untuk mendukung keberlanjutan.

Kepedulian akan keberlanjutan sudah mulai berkembang di Indonesia. Negara Indonesia sudah mulai menyusun gagasan-gagasan mengenai sustainability. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals (SDGs)* juga sudah tertuang dalam Salinan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pada bidang teknik sipil para perencana dan kontraktor sudah mulai mengedepankan aspek berkelanjutan dalam setiap pembangunan yang dilakukan. Dalam pembangunan infrastruktur kota berkelanjutan konsultan perencana harus memiliki tolak ukur atau standar dasar mengenai *sustainability citie's*. Belum adanya indikator yang sesuai dengan budaya perkotaan di Indonesia membuat pembangunan infrastruktur kota berkelanjutan di Indonesia terhambat.

Sehingga, diperlukan suatu indikator yang di adaptasi dari negara-negara maju yang memiliki kota-kota berkelanjutan didalamnya. Indikator-indikator tersebut akan di formulasikan berdasarkan pendapat para ahli dan instansi pemerintah apakah indikator tersebut dapat dijadikan indikator kota berkelanjutan di Indonesia .

Indikator *sustainability citie's* yang dinilai sesuai untuk dijadikan indikator kota berkelanjutan di Indonesia tersebut juga harus dipilah-pilah untuk mengetahui indikator yang dapat diimplementasikan dan tidak dapat diimplementasikan di Indonesia. Hal ini perlu diketahui dikarenakan ada beberapa indikator *sustainability citie's* yang tidak dapat diimplementasikan dikarenakan oleh adanya hambatan-hambatan yang menghalangi pengimplementasian indikator tersebut.

Perlu diketahui juga hambatan-hambatan apa saja yang menghalangi pengimplementasian indikator-indikator *sustainability citie's* yang sesuai di Indonesia tersebut. Hal ini diperlukan untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

Dengan mengetahui indikator-indikator *sustainability citie's* yang sesuai dan dapat diimplementasikan di Indonesia, diharapkan konsultan perencana dan instansi pemerintah terbantu dalam merancang suatu kota yang berkelanjutan. Disamping itu, dengan diketahuinya indikator yang tidak dapat diimplementasikan beserta hambatannya, dapat membantu pemerintah dan konsultan perencana dalam mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hambatan pengimplementasian indikator-indikator *sustainability citie's* .

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja indikator-indikator *sustainability citie's* yang sesuai untuk dijadikan indikator *sustainability citie's* di Indonesia?
2. Apa saja Indikator-indikator *sustainability citie's* yang dapat diimplementasikan di Indonesia?
3. Apa saja yang menghambat indikator *sustainability citie's* yang tidak dapat di implementasikan di indonesia?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian. Batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Indikator *sustainability citie's* bersumber dari jurnal dokumen HABITAN INTERNATIONAL, *International Urban Sustainability Indicators List* (IUSIL). Indikator ini diambil dikarenakan indikator tersebut sudah dipromosikan oleh United Nations (2007), the UN Habitat (2004), the World Bank (2008), the European Foundation (1998), the European Commission on Science, Research and Development (2000), the European Commission on Energy Environment and Sustainable Development (2004). Indikator ini juga sudah dipakai oleh banyak negara dan komunitas sebagai refrensi dalam mengembangkan kota berkelanjutan (Shin.

2. Indikator kota berkelanjutan merupakan 110 indikator yang terdiri dari 4 dimensi pembangunan yaitu: ekonomi, lingkungan, sosial-budaya, dan pemerintah.
3. Sumber kajian atau responden adalah pakar-pakar yang ahli dalam bidang sustainability yang terdapat di Indonesia, Dinas Pemerintah Kota, Kontraktor Negeri atau Swasta.

1.4. Keaslian Tugas Akhir

Berdasarkan pengecekan dan pengamatan yang telah dilakukan. Tugas Akhir dengan judul Studi Implementasi Indikator-Indikator Sustainable Cities di Indonesia belum pernah dilakukan.

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui indikator kota berkelanjutan yang sesuai dan dapat diimplementasikan di Indonesia.
2. Mengetahui hambatan Indikator kota berkelanjutan yang tidak dapat diimplementasikan di Indonesia.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perencana

Dapat memberikan tolak ukur atau standar dasar mengenai *sustainability* kepada rencana kota berkelanjutan

2. Bagi Peneliti

Dapat menjadi gambaran dan referensi serta pedoman penelitian serupa.

